

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prosedur akuntansi penerimaan kas, pencatatan akuntansi di dasarkan pada transaksi penerimaan kas yang dicatat kedalam jurnal penerimaan kas dan diposting ke jurnal penerimaan kas kedalam buku besar, apabila diperlukan akan dicatat bukti transaksi penerimaan kas kedalam buku besar.
2. Laporan yang dihasilkan dari prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) adalah neraca SKPKD dan catatan atas laporan keuangan.
3. Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan kas. penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintahan yang di tunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Disetorkan melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga
 - b. Disetor langsung ke bank
 - c. Disetor melalui bank lain, badan lembaga keuangan dan kantor pos oleh pihak ketiga.

Sementara pengendalian yang baik terhadap kas memerlukan prosedur yang memadai untuk melindungi penerimaan kas maupun pengeluaran kas, dalam merancang prosedur-prosedur tersebut hendaknya di perhatikan ada tiga prinsip pokok pengendalian penerimaan kas sebagai berikut :

1. Harus terdapat pemisahan tugas secara tepat, sehingga petugas yang bertanggung jawab menangani transaksi kas dan menyimpan kas tidak merangkap sebagai petugas pencatat transaksi kas.
2. Semua penerimaan kas hendaknya disetorkan seluruhnya kas bank secara harian.

Sementara pada sebuah prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

1. Fungsi akuntansi pada SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas mencatat kedalam jurnal pengeluaran kas secara periodik atau berkala melakukan posting dari jurnal ke buku besar, jika dianggap perlu SKPD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan control buku besar pembantu.
2. Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah : Bukti kas keluar, cek dan permintaan cek.
3. BUD bertanggung jawab atas pengelolaan pengeluaran kas daerah untuk mengelola kas daerah tersebut, BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang baik. Setelah menerima SPP, PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan kemudian menerbitkan SPM. sesuai dengan karakter SPP, berdasarkan SPM yang ada BUD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM dan menyetujuinya dengan mengeluarkan SP2D penggunaan anggaran untuk pencairan dana bendaharawan, apabila SPM tidak lengkap maka dikeluarkan suatu penolakan penerbitan SP2D.

Sedangkan untuk pengendalian pengeluaran kas, Seperti halnya penerimaan kas, pengeluaran kas juga memiliki prosedur yang dirancang sedemikian rupa sehingga terhindar dari pencurian, kehilangan kas ataupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat pengalokasiannya. Untuk dapat menghasilkan pengawasan yang baik, prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Semua pengeluaran dilakukan dengan cek , pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil.
2. Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu
3. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan yang mencatat pengeluaran kas.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat yang mungkin dapat dijadikan yang diharapkan bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi kepala BPNB Sumbar :

1. Untuk terus mengevaluasi prosedur mengenai penerimaan kas pada setiap jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan kondisi institusi, keadaan ekonomi, kemajuan teknologi serta faktor-faktor lainnya. Pengevaluasian ini di harapkan dapat menciptakan prosedur penerimaan kas yang lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap penerimaan kas tersebut.
2. prosedur mengenai pengeluaran kas pada setiap jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi institusi, keadaan ekonomi, kemajuan teknologi serta faktor-faktor lainnya. Pengevaluasian ini di harapkan dapat menciptakan prosedur penerimaan kas yang lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga

dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap pengeluaran kas tersebut.

3. Dan menambah tempat untuk menyiapkan dokumen-dokumen berdasarkan susunan per tahunnya.

